

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi semua kebutuhan akan hidupnya tanpa pertolongan manusia lain. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan manusia lain.

Manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia orang berupaya dengan berbagai cara untuk memperoleh penghasilan. Dalam mencari penghasilan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dituntut untuk bekerja.

Untuk mencari pekerjaan tersebut tentunya diperlukan adanya penyedia jasa, Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi menyebutkan bahwa penyedia jasa adalah orang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, yang terdiri dari perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.

Dalam hal ini pihak penyedia jasa juga harus berhubungan dengan pihak pengguna jasa Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang

memerlukan layanan jasa konstruksi. Menurut Ervianto, pengguna jasa adalah badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyeluruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan lembaga/instansi pemerintah ataupun swasta.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan menyatakan bahwa outsourcing / alih daya adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis, namun Undang-undang cipta kerja mencabut pasal 64, 65 kemudian menegaskan bahwa pasal 66 tetap ada, dimana hubungan kerja terjadi antara buruh atau pekerja dengan perusahaan (outsourcing) berdasarkan PKWT/PKWTT dan menyerahkannya kepada perusahaan pengguna jasa. sehingga pekerja atau tenaga kerja bukan karyawan atau tenaga kerja tetapi perusahaan tersebut melainkan tenaga kerja kontrak dengan jangka waktu tertentu. Outsourcing adalah pekerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.¹ Dimuatnya ketentuan outsourcing pada undang-undang cipta kerja dimaksudkan untuk mengundang para investor agar mau berinvestasi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, dan

¹ Moch. Nurachmad, *Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja (Outsourcing)*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 1.

mengurangi jumlah pengangguran yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan.²

Pada dasarnya tujuan utama suatu perusahaan melakukan outsourcing adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan kompetitif perusahaan agar dapat mempertahankan hidup dan berkembang. Mempertahankan hidup berarti tetap dapat mempertahankan pangsa pasar, sementara berkembang berarti dapat meningkatkan pangsa pasar, dengan tujuan strategis ialah bahwa dengan melakukan outsourcing, perusahaan ingin meningkatkan kemampuannya berkompetisi, atau ingin meningkatkan atau sekurang-kurangnya mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Kompetisi antara perusahaan umumnya menyangkut tiga hal, yaitu harga produk, mutu produk dan layanan.

Outsourcing adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa *outsourcing*). Pengertian outsourcing dapat dilihat didalam pasal 1 butir 14 undang-undang cipta kerja yang berbunyi “badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan.” Melalui pendelegasian, maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa *outsourcing*.³

Perjanjian kerja outsourcing adalah perjanjian antara perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan

² Prin Mahadi, *Outsourcing Komoditas Politikah*, (www.wawasandigital.com), diakses 10 April 2021 pukul 19:52.

³ Sehat Damanik, *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Jakarta : DSS Publishing, 2006), hlm 10

pekerja/buruh di perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Oleh karena itu, pekerjaan harus diserahkan pada pihak yang lebih profesional dan lebih berpengalaman daripada perusahaan sendiri dalam melaksanakan jenis pekerjaan yang diserahkan, tidak sekedar pihak ketiga saja. Namun demikian tidak semua pekerjaan dapat dialihkan dengan cara outsourcing, hanya pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja yang dapat dialihkan kepada perusahaan lain. Perusahaan dalam hal ini dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan, atau penyediaan jasa pekerja.

Perjanjian kerja dalam outsourcing dilakukan dalam dua tahap yaitu perjanjian antara Perusahaan Pengguna Jasa Outsourcing dengan Perusahaan Outsourcing sebagai penyedia jasa tenaga kerja, dan perjanjian antara Perusahaan pengguna jasa dengan pekerja/buruh. Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menciptakan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu hubungan kerja, yaitu hak pengusaha (pengusaha memiliki posisi lebih tinggi dari pekerja), kewajiban pengusaha (membayar upah), dan objek perjanjian (pekerjaan).⁴

⁴ Moch. Nurachmad, *Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja (Outsourcing)*, hlm. 2

Pekerja outsourcing yang akan melakukan pekerjaan dengan system ini harus melakukan perjanjian dengan pengguna jasa dan harus menaati perjanjian yang telah dibuatnya dan keduanya tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban.⁵ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶

Setelah perjanjian outsourcing tersebut telah disepakati Sehingga menimbulkan lahirnya suatu perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak yang kemudian akan melahirkan hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan.

Pasal 65 ayat (1) undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan :

“Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis”. Akan tetapi sekarang sudah tidak berlaku, ketentuan outsourcing telah digantikan dengan undang-undang cipta kerja akan tetapi pasal 66 tetap ada, dimana hubungan kerja terjadi antara pekerja buruh dengan perusahaan outsourcing berdasarkan pkwt dan pkwt dan menyerahkan kepadaperusahaan pengguna jasa.

⁵ Budiono Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, hal. 6.

⁶ Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal.1.

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) yaitu: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, outsourcing dibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang dan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dalam penjelasan Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core bussiness) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain : usaha pelayanan, kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Akan tetapi sekarang sudah digantikan dalam undang undang cipta kerja yang menggantikan pasal 66 yang dimana hubungan kerja terjadi antara buruh/pekerja dengan perusahaan (outsourcing) berdasarkan PKWT/PKWTT dan menyerahkannya kepada perusahaan pengguna jasa.

Ketentuan outsourcing pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengundang para investor agar mau berinvestasi di Indonesia. Penggunaan outsourcing seringkali digunakan sebagai strategi kompetisi perusahaan untuk fokus pada core business-nya.

Namun, pada prakteknya outsourcing didorong oleh keinginan perusahaan untuk menekan cost hingga serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntungan berlipat ganda walaupun seringkali melanggar etika bisnis yaitu bahwa pekerja merupakan stakeholder di perusahaan yang juga memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari hasil kerjanya di perusahaan.

Praktek sehari-hari outsourcing lebih menguntungkan bagi perusahaan tetapi tidak demikian dengan pekerja/buruh, dimana para buruh kontrak outsourcing merasa tidak diperhatikan kesejahteraan oleh perusahaan, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karir, sehingga dalam keadaan seperti itu pelaksanaan outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan industrial.

Namun kenyataannya, dalam perjanjian outsourcing tersebut tidak selamanya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan yang disepakati bersama dan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang lain. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan atau disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak maka berakibat ia harus bertanggung jawab berdasarkan wanpretasi dan jika salah satu pihak yang tidak mentaati peraturan maka berakibat ia harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka sebagai konsekuensi dari adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut muncul tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian outsourcing.

Dengan adanya perjanjian outsourcing tersebut, PT Trengginas Jaya mempunyai tanggung jawab hukum. Tanggung jawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siap digugat karena adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, setiap kewenangan yang sah baik bersumber dari undang-undang maupun perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab hukum pada si pelaksana kewajiban itu.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul : **“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Outsourcing Antara Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Dengan Pekerja Dalam Melakukan Pekerjaan Dengan Sistem Kontrak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, untuk mempermudah dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa, pengguna jasa dan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak?
2. Bagaimana peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa, pengguna jasa dan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak?

⁷ Nunuk Listyowati, “Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum,” Jurnal Spirit Pro Patria, Volume 1 Nomor 2 (Juli, 2015), hal. 30

3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa, pengguna jasa dan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa, pengguna jasa jasa dan dengan pekerja dalam melakukan perjanjian kerja dengan sistem komtrak.
2. Untuk mengetahui peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa, pengguna jasa jasa dan dengan pekerja dalam melakukan perjanjian kerja dengan sistem komtrak.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa, pengguna jasa jasa dan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya di bidang ilmu hukum perdata, penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam melakukan perjanjian kerja dengan sistem komtrak.

2. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan wawasan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam melakukan perjanjian kerja dengan sistem komtrak.

3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu ilmu pengetahuan dan juga wawasan yang bersifat umum, dan khususnya di bidang ilmu hukum perdata yang berkaitan tentang pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing, dan untuk memberikan suatu masukan atau tambahan informasi dan reference yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam melakukan perjanjian kerja dengan sistem kontrak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode ini merupakan cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.⁸

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan menggunakan pendekatan Normatif, pendekatan normatif adalah sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif⁹. Karena Penulis akan melakukan penelitian tentang peraturan/kaidah-kaidah hukum dan asas hukum dalam tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam melakukan perjanjian kerja dengan sistem kontrak dan akibat hukumnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis oleh karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa, pengguna jasa dan dengan pekerja dalam melakukan perjanjian kerja dengan sistem kontrak dan akibat hukumnya.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 67.

⁹ Hadikusumah Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995)

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Penelitian Kepustakaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja
- d) Akta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam melakukan perjanjian kerja dengan system komtrak.

¹⁰ Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 18

¹¹ *Ibid.*

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹² Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan analisa kepustakaan tentang pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak.

1) Lokasi penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian ini di PT Graha Sarana Duta yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia barang dan jasa (outsourcing) yang berada di kota Semarang.

2) Obyek Penelitian

Pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang dijadikan subyek adalah PT Graha Sarana Duta yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manajemen properti pengguna jasa (outsourcing) yang berada di kota Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

¹² Asikin Zainal Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara menghimpun, mempelajari dan mengutip dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Outsourcing.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1) Observasi

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa, pengguna jasa dalam melakukan perjanjian kerja dengan sistem kontrak dan akibat hukumnya.

2) Wawancara

Melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan menyusun sejumlah pertanyaan kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bekerja di PT Graha Srana Duta sehingga penulis memperoleh keterangan dan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

4) Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang

berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam melakukan perjanjian kerja dengan system kontrak dan akibat hukumnya.

Setelah itu dipadukan dengan penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya. Kemudian hasil dari analisis tersebut disajikan secara deskriptif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai perjanjian kerja outsourcing antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak dan akibat hukumnya, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan.¹³

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

¹³ Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

- D. Manfaat penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perjanjian Kerja Outsourcing
- B. Pengertian Penyedia Jasa, Pengguna Jasa Dan Pekerja
- C. Pengertian Pekerjaan dengan Sistem Kontrak
- D. Syarat- Syarat Outsourcing
- E. Pihak-Pihak Dalam Melakukan Outsourcing
- F. Perjanjian Antara Penyedia Jasa, Pengguna Jasa Dengan Pekerja
- G. Hubungan Hukum antara Penyedia Jasa Dengan Pengguna Jasa dan dengan Pekerja
- H. Hak dan Kewajiban Antara Penyedia Jasa, Dengan Pekerja
- I. Peraturan Yang Berlaku Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing
- J. Tanggung Jawab Hukum berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
- K. Berakhirnya Perjanjian Kerja Outsourcing

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Outsourcing Antara Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Dengan Pekerja dalam Melakukan Pekerjaan dalam Sistem Kontrak
 - 2. Peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian antara penyedia jasa,

pengguna jasa dan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak

3. Tanggungjawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan dengan Pekerja dalam Melakukan Pekerjaan dengan Sistem Kontrak

B. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Outsourcing antara Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan dengan Pekerja dalam Melakukan Pekerjaan dengan Sistem Kontrak
2. Peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian antara penyedia jasa, pengguna jasa dan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak
3. Tanggungjawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Atas Dasar Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Penyedia Jasa, Pengguna Jasa Dan Dengan Pekerja Dalam Melakukan Pekerjaan dengan Sistem Kontrak

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA